BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu bentuk atau usaha dalam meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dari pembangunan itu sendiri ialah memperbaiki dan mengembangkan sesuatu untuk kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik dapat dilihat dari tiga nilai pokok utama menurut (Todaro & Smith, 2011) yaitu yang pertama, terjadinya peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam kebutuhan barang pokok untuk kehidupan masyarakat, yang kedua, peningkatan pada standar hidup seseorang yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatannya, selain itu juga dapat dilihat dari ketersediaan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan masyarakat, serta peningkatan perhatian atas norma dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dan ketiga, perluasan pada pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta negara secara keseluruhan sehingga tidak selalu bergantung kepada negara-negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kapasitas dari sebuah perekonomian yang kondisi awalnya kurang baik dan bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama menjadi lebih berkembang dan terdapat peningkatan untuk menciptakan serta mempertahankan kenaikan pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2011). Pada teori klasik menurut Adam Smith (1729-1790) yang dikemukakan dalam (Didu & Fauzi, 2016) dimana Smith menganggap bahwa

manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) atau sumber daya alam memerlukan sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar perekonomian juga tumbuh.

Pembahasan oleh Smith di atas berarti bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam membangun perekonomian di suatu negara. Karena tanpa adanya sumber daya manusia yang baik untuk mengolah sumber daya alam yang ada pada suatu negara, maka pembangunan ekonomi di negara tersebut tidak akan dapat berkembang dengan baik. Untuk dapat berkembang dengan baik, maka diperlukan manusia yang dapat melakukan sebuah pekerjaan guna menjalankan perputaran ekonomi. Manusia yang melakukan sebuah pekerjaan tersebut dinamakan tenaga kerja, menurut (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*, 2003) kategori penduduk yang dapat dikatakan tenaga kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun. Dimana tenaga kerja inilah yang menjadi faktor penting dalam membangun sistem perekonomian di suatu negara.

Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang ada di suatu negara, maka akan semakin baik pula perekonomian di suatu negara tersebut dikarenakan output yang dihasilkan semakin besar. Dikarenakan negara tersebut tidak mengalami kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja (manpower) terdiri atas dua kelompok yaitu

angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja (Dumairy, 2002). Menurutnya, angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan/bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari kerja. Sehingga dari teori tersebut, angkatan kerja merupakan salah satu faktor yang menarik untuk dibahas. Berikut ini merupakan laju persentase angkatan kerja di Indonesia selama 5 tahun terakhir.

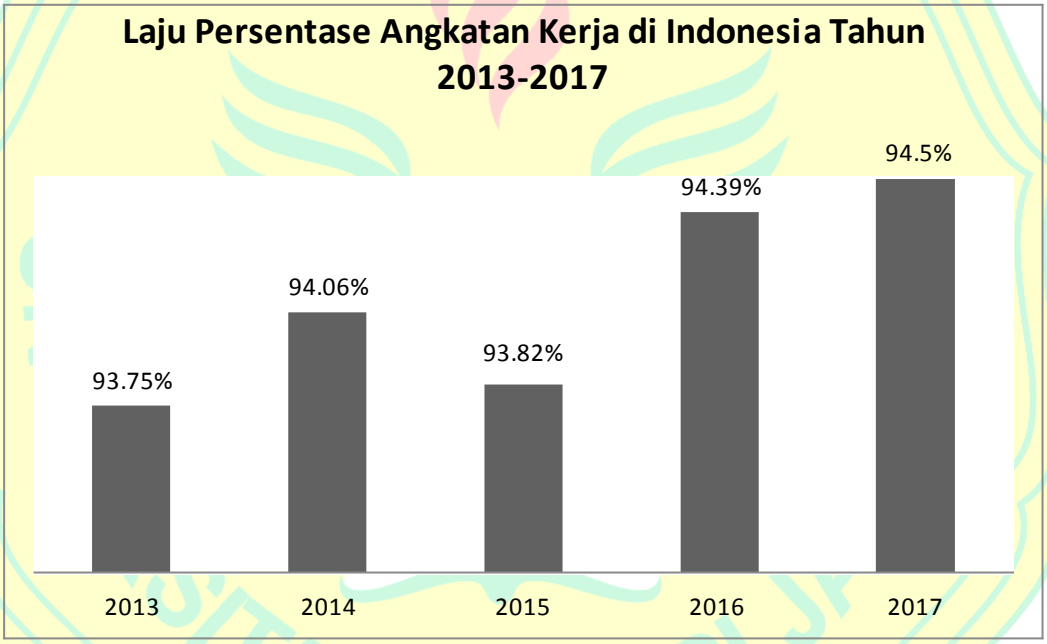

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar I.1 Laju Persentase Angkatan Kerja di Indonesia 2013-2017

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa laju persentase angkatan kerja di Indonesia mengalami keadaan yang fluktuatif. Menurut data di atas dapat dilihat bahwa persentase angkatan kerja tertinggi selama 5 tahun terakhir terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 94,5% dan persentase angkatan kerja terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 93,82%.

Berdasarkan persentase laju angkatan kerja di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia selama 5 tahun terakhir tersebut fluktuatif, namun dengan naiknya angka angkatan kerja selama 3 tahun terakhir berarti jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia meningkat hingga tahun 2017. Dengan meningkatnya ketersediaan tenaga kerja tersebut berarti angka angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja terjadi kenaikan pula.

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menjadi keberhasilan pembangunan ekonomi dan hal tersebut dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan yang merata mencerminkan bahwa setiap masyarakat yang bekerja telah menikmati hasil dari pembangunan ekonomi. Pemerataan kesejahteraan tersebut terlihat dari jumlah angkatan kerja yang terdistribusi dengan baik. Untuk mengetahui seberapa baik persebaran angkatan kerja yang ada di Indonesia kita harus melihat seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Berikut ini merupakan data angkatan kerja per pulau di Indonesia pada tahun 2017.

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar I.2 Data Angkatan Kerja Per Pulau di Indonesia Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas dapat disintesiskan bahwa pulau Jawa merupakan penyumbang angkatan kerja terbesar di Indonesia yakni sebanyak 73.909.597 jiwa. Jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, sangat terlihat perbedaannya, dimana pulau Sumatera hanya menunjukkan angka sebesar 27.036.466 jiwa dan pulau Sulawesi yang menjadi penyumbang terbesar ketiga yakni 8.725.369 jiwa, maka dari itu pulau Jawa menarik untuk di dalami. Berikut ini merupakan data persebaran angkatan kerja di pulau Jawa.

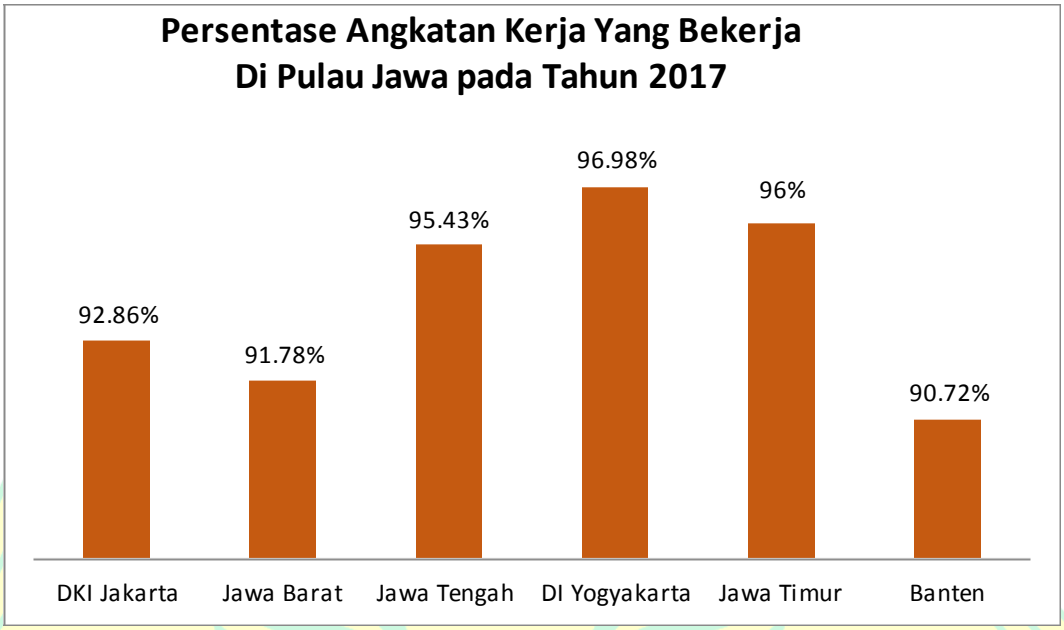

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar I.3 Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja di Pulau Jawa pada Tahun 2017

Data di atas menunjukkan bahwa angkatan kerja yang tertinggi adalah di provinsi D.I Yogyakarta yakni sebesar 96.98% dan terendah ada pada provinsi Jawa Barat 91.78% namun persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja terendah terjadi di tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Hal ini tentu menjadi permasalahan, karena hal tersebut menggambarkan bahwa masih kurangnya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau menganggur dari total angkatan kerja yang ada.

Hal tersebut di atas tentu menjadi permasalahan yang cukup menarik perhatian, karena ketiga provinsi di atas merupakan provinsi-provinsi besar yang menjadi pusat perekonomian negara dan memiliki lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang cukup tinggi, namun angkatan kerja yang ada tidak dapat terserap dengan baik.

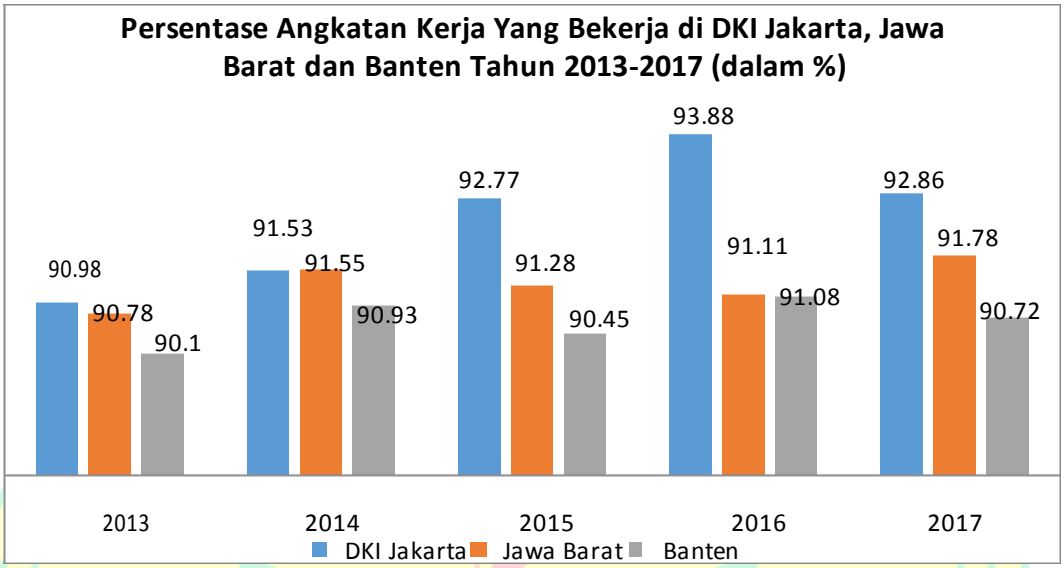

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar I.4 Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2013-2017

Berdasarkan gambar di atas, persentase tertinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah di tahun 2016 yakni sebesar 93.88% lalu di Provinsi Jawa Barat adalah di tahun 2017 yakni sebesar 91.78% dan di Provinsi Banten di tahun 91.08%. Hal ini berarti angkatan kerja yang bekerja masih kurang dibandingkan dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten merupakan provinsi yang terdiri atas banyak kabupaten atau daerah sehingga dapat dikategorikan sebagai daerah yang mempunyai masyarakat yang sangat banyak dan tidak semuanya dapat diserap dalam dunia kerja. Oleh karena itu, angkatan kerja yang bekerja tersebut masih rendah.

Penyerapan tenaga kerja memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya; (1) investasi (PMA dan PMDN) yang merupakan penanaman modal asing maupun dalam negeri yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri untuk mengoptimalkan sumber daya yang belum termanfaatkan. (2) inflasi, merupakan

naiknya harga barang dan jasa pada umumnya dan berlangsung secara terus menerus pada beberapa periode tertentu. (3) Upah minimum, merupakan penetapan upah oleh pemerinitah baik kabupaten/kota/provinsi dalam bentuk uang kepada hak pekerja/buruh sebagai imbalan yang didasari oleh kesepakatan kerja sebelumnya (Putri, Haryatiningsih, & Riani, 2017). Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara dapat dilihat berdasarkan besarnya investasi yang terjadi pada suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Makmun dan Yasin dalam (Momongan, 2013) Investasi adalah kata kunci penentu laju pembangunan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu investasi menjadi salah satu hal penting yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi disuatu negara karena dengan adanya investasi tersebut dapat didirikan suatu usaha baru atau dikembangkannya suatu usaha tertentu.

Investasi merupakan salah satu variabel yang mampu mendongkrak perekonomian suatu daerah. Investasi bisa berupa penanaman modal untuk membuka usaha baru, memperluas usaha atau menambah kapasitas serta menambah jumlah aktivitas barang dan jasa yang akan menyerap banyak tenaga kerja serta menambah peningkatan belanja dan pendapatan masyarakat (Cahyono & Putri, 2017). Investasi yang dimaksud dapat berupa penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang mana akan memberikan modal untuk daerah.

Modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri tersebut akan membantu perekonomian suatu daerah. Investasi dalam negeri dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal asing yang masuk ke suatu negara sebagaimana yang ditulis (Kuncoro, 2010) yaitu: *pertama*, sumber dana eksternal dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang sebagai dasar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, *kedua*, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan struktur ekonomi dan perdagangan; *ketiga*, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural; keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun setelah perubahan struktural benar-benar terjadi. Investasi asing meningkatkan kemampuan produksi dan menjadi media transfer teknologi dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam hal produksi, investasi asing bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dalam negeri dengan transfer teknologi yang dibawa bersamaan dengan masuknya investasi asing. Kehadiran investasi asing juga bisa meningkatkan daya saing dan keunggulan produk domestik.

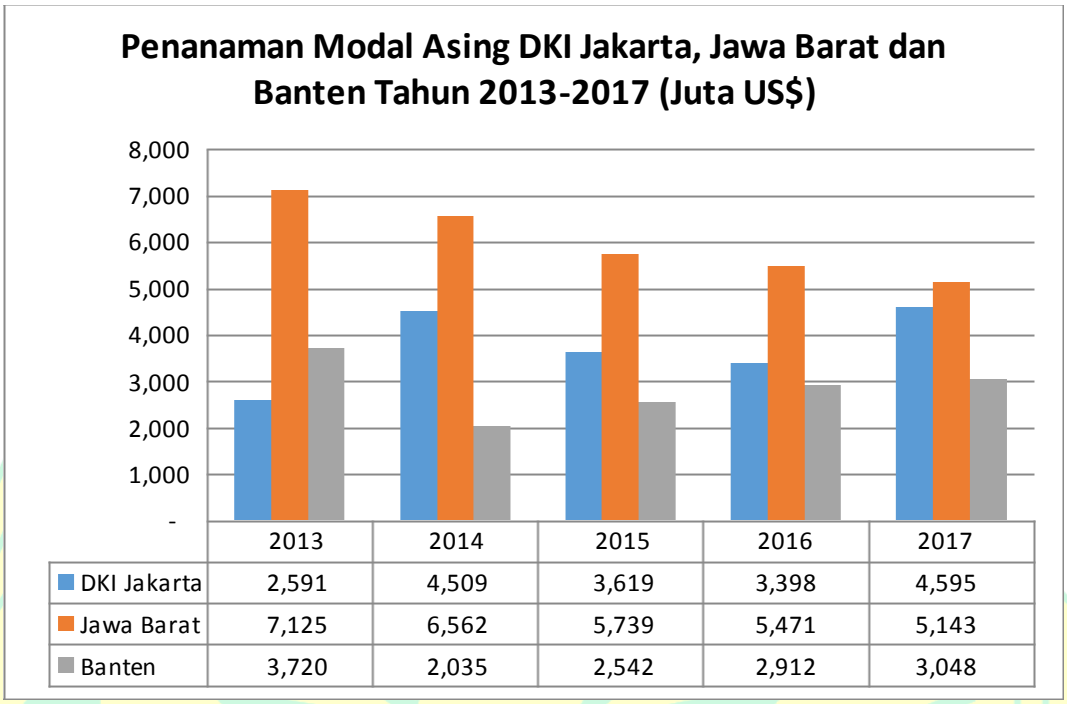

Sumber: BPS Jakarta (data diolah)

Gambar I.3 Penanaman Modal Asing DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2013-2017

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa keadaan investasi asing atau penanaman modal asing yang terjadi di DKI Jakarta tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar USD 4.595 (juta) dan terendah berada pada tahun 2013 yaitu sebesar USD 2.591 (juta). Lalu pada Provinsi Jawa Barat menunjukkan data penanaman modal asing tertinggi berada pada tahun 2013 yaitu sebesar USD 7.125 (juta) dan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar USD 5.143 (juta). Dan pada Provinsi Banten menunjukkan data penanaman modal asing tertinggi yang terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar USD 3.720 (juta) dan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar USD 2.035 (juta).

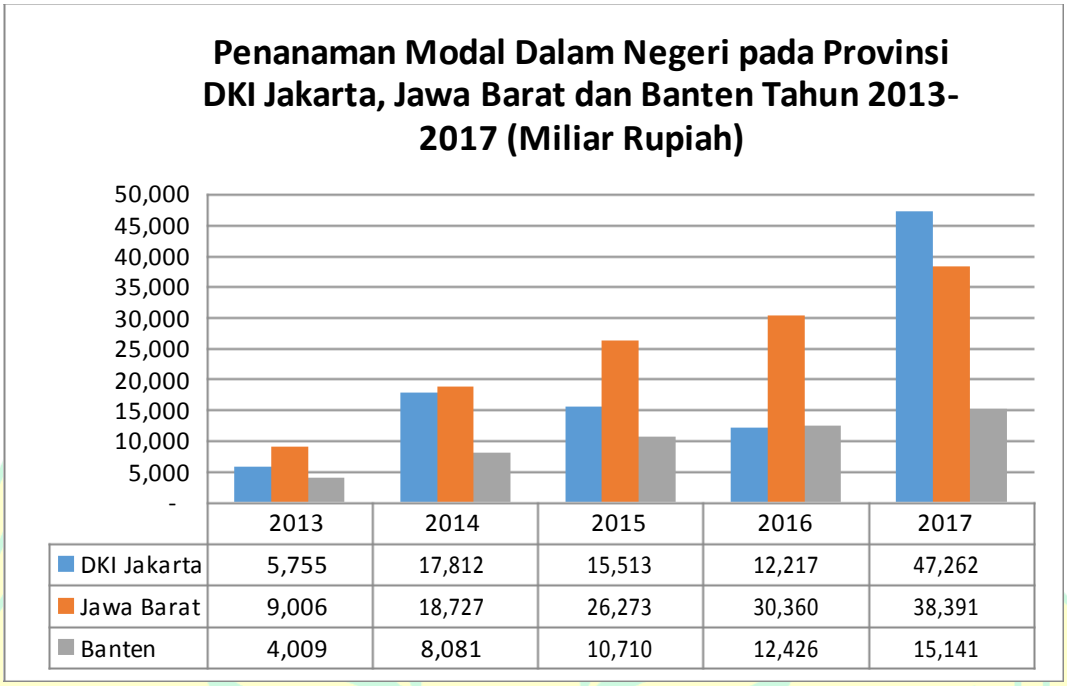

	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	5,755	17,812	15,513	12,217	47,262
Jawa Barat	9,006	18,727	26,273	30,360	38,391
Banten	4,009	8,081	10,710	12,426	15,141

Sumber: BPS Jakarta (data diolah)

Gambar I.4 Penanaman Modal Dalam Negeri pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2013-2017

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa keadaan penanaman modal dalam negeri pada Provinsi DKI Jakarta berfluktuatif, dengan penanaman modal tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 47.262 (miliar) dan nilai terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 5.755 (miliar). Sedangkan pada Provinsi Jawa Barat dan Banten menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Nilai tertinggi pada Provinsi Jawa Barat terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 38.391 (miliar) sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 9.006 (miliar). Pada Provinsi Banten nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 15.141 (miliar) dan nilai terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 4.009 (miliar).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2003-2017. Penelitian ini menggunakan data panel tentang Penyerapan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang ada, yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tahun 2003-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tahun 2003-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tahun 2003-2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh antara penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tahun 2003-2017.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tahun 2003-2017.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tahun 2003-2017.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Pemerintah

   - Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja

yang mengarah pada kemajuan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

- Sebagai pedoman untuk membangun dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
- Sebagai bahan perbandingan untuk pemerintah dan masyarakat Jakarta untuk memperbaiki dan membangun perekonomian dan kersejahteraan masyarakat pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

b. Bagi Akademik

- Penelitian ini hendaknya dapat menjadi referensi dan pembelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa lain.
- Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk membantu penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.